



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 855/III/2015

IV/MARET 2015



Komisi III Pantau Lapas di Papua



Komisi III Pantau Lapas di Papua



Tim Kunker Komisi III DPR kunjungi Lapas

Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Provinsi Papua memberikan perhatian pada penanganan masalah Lembaga Pemasyarakatan di wilayah ini. Sejumlah isu mengemuka mulai dari *over capacity* sampai problem anggaran lauk pauk yang tidak memadai.

“Kita memberikan perhatian pada penanganan warga binaan di sejumlah Lapas. Kita banyak mendengar permasalahan yang dihadapi dari Kepala Lapas, tentu kita akan carikan solusi dalam raker dengan Menkumham,” kata Ketua Tim Kunker Benny K. Har-

man usai meninjau Lapas Abepura di Jayapura, Papua, Kamis (19/3/15).

Dalam kunjungan ke Lapas Kelas II Abepura, Tim Kunker melihat fasilitas untuk sel khusus wanita, klinik dan gedung baru untuk narapidana tipikor (tindak pidana korupsi). Secara umum menurut Benny yang juga Wakil Ketua Komisi III fasilitas yang tersedia cukup baik.

Tim Kunker diantaranya Yaqu Cholil Qoumas (FPKB), I Putu Sudiartana (FPD) dan Wenny Haryanto (FPG) berkesempatan berdialog dengan napi

tipikor, mendengar sejumlah masukan dari mereka. Sementara itu anggota Tim Kunker Wihadi Wiyanto dari Fraksi Partai Gerindra menyatakan dukungan terhadap usulan kenaikan anggaran lauk pauk bagi para napi di Papua.

“Saya rasa usulan kenaikan anggaran lauk pauk itu dapat diterima karena memang di Papua ini standar harga kebutuhan bahan pokok lebih tinggi dari wilayah lain,” ujar dia.

Kakanwil Kemenkumham Provinsi Papua Demianus Rumbiak memaparkan standar harga biaya makan yang kebijakannya secara terpusat belum mengakomodir kebutuhan harga di daerah seperti Papua. Ia berharap DPR bersama Menkumham meninjau kembali penyesuaian harga daerah setempat dengan melihat perbedaan harga daerah pegunungan, pesisir dan kepulauan.

Pada bagian lain Kadiv Pemasarakatan Johan Yarangga mengusulkan agar dana Otonomi Khusus yang cukup banyak dikucurkan untuk Papua sebagian dapat digunakan pembangunan lapas. “Apa bisa Lapas mendapat anggaran dari dan dana Otsus yang cukup besar itu. Kondisinya kami bekerja untuk Pemda tapi kami dipandang sebelah mata,” tutur dia. (iky) Foto: Ibnur Khalid/Parle/HR

Dewan Dukung Pemekaran Bogor Barat

Delegasi Masyarakat Bogor Barat, Kamis (19/3) terdiri kader-kader lintas partai dan LSM, menemui Wakil Ketua DPR Fadli Zon di ruang kerjanya Lantai III Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta. Kedatangannya dalam rangka menyampaikan usulan pembentukan Kabupaten Bogor Barat. Sebab berdasarkan kondisi geografis dan jumlah penduduk sudah memenuhi syarat untuk dimekarkan menjadi Kabupaten tersendiri. Wilayah yang terdiri 14 kecamatan ini,

pendapatan asli daerah (PAD) nya telah mencapai 280 miliar lebih.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang didampingi anggota Komisi II DPR Subarna menanggapi usulan tersebut menyatakan, secara pribadi sangat memahami dan mendukung upaya pemekaran Bogor Barat, karena wilayahnya sudah terlalu besar seperti Singapura.

Ia menyatakan, DPR mendukung pemekaran segera tere-



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima Delegasi Masyarakat Bogor Barat

alisasi sebagai Kabupaten baru Bogor Barat, sebab jumlah penduduknya sudah mencapai 5,2 juta jiwa, dan daerah ini merupakan satu-satunya Kabupaten yang menjadi daerah

pemilihan (Dapil). “Jadi saya kira sangat wajar kalau ada pemekaran, apalagi di beberapa wilayah Bogor Barat belum optimal pembangunannya,” katanya.

Pimpinan Dewan dari Fraksi Gerindra ini mengaku melihat sendiri beberapa wilayah Bogor Barat seperti Rumpin, Jasinga dan lainnya, secara administrative jauh ke pusat kota. Apalagi, lanjutnya, hal ini sudah masuk Prolegnas dan anggota DPR Subarna akan membantu memperjuangkan di Komisi II sehingga pemekaran tersebut bisa segera terealisasi.

Anggota DPR Subarna menambahkan, sesuai reses dan masuk persidangan pada tanggal 23 Maret mendatang, pihaknya akan mengajukan usulan ini kepada Komisi II. Semula telah diusulkan adanya pemekaran 15 kabupaten dan akan ditambah menjadi 20 kabupaten. “Kami akan coba sampaikan dan Komisi II bisa mengagendakan pembahasan pemekaran termasuk usulan pemekaran Kabupaten Bogor Barat ini,” ujar politisi Gerindra dari Dapil Jabar ini. (mp) Foto: Iwan Armanias/Parle/HR

Tidak Ada Upaya DPR Lemahkan KPK

DPR menyambut baik inisiatif dari Plt Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang datang bersilaturahmi kepada Pimpinan DPR dan Pimpinan Komisi III. Peristiwa ini adalah suatu babak baru dan komunikasi antar lembaga yang sangat baik dan kita sama-sama berkomitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi.

“Kita sangat *committed* baik penindakan ataupun pencegahan. Tidak ada upaya DPR untuk melemahkan KPK. Tapi kita juga ingin KPK betul-betul suatu lembaga yang netral, tidak melampaui kewenangannya seperti yang kita anggap pada periode lalu,” tandas Wakil Ketua DPR Fadli Zon, sesuai menggelar pertemuan dengan Pimpinan KPK, Senin (16/3) di Gedung DPR, Jakarta.

Hadir dalam pertemuan *courtesy call* Pimpinan DPR lengkap terdiri Ketua Setya Novanto didampingi Wakil-wakil Ketua, Fadli Zon, Fahri Hamzah, Agus Hermanto dan Taufik Kurniawan didampingi Pimpinan Komisi III DPR. Dari KPK hadir Pimpinan lengkap tiga Plt Pimpinan Taufiqurrahman Ruki, Johan Budi dan Indriyanto Seno Aji dan dua Pimpinan KPK definitif, Adnan Pandupraja dan Zulkarnain didampingi Sekjen KPK serta Sekjen DPR dan pejabat lainnya.

Hal yang sama disampaikan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, kunjungan ini merupakan tradisi baik dalam rangka membangun komunikasi dengan



Pimpinan DPR RI saat pertemuan dengan Pimpinan KPK

lembaga-lembaga negara yang lain. Apalagi dengan sesama penegak hukum telah dirintis untuk membangun komunikasi yang lebih baik ke depan.

Fadli Zon mengharapkan, silaturahmi ini bukan pertemuan yang pertama, tetapi akan terus dibangun komunikasi yang baik di masa yang akan datang. Dewan, lanjut Pimpinan Dewan Koordinator Polkam, akan terus mendorong pemberantasan korupsi ke depan dengan cara-cara yang bermartabat dan tetap dalam koridor hukum.

Plt Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki dalam kesempatan ini menjelaskan, pertemuannya dengan Pimpinan DPR tidak membicarakan agenda besar atau agenda teknis, tetapi lebih ba-

nyak *courtesy call*. Adalah wajar dalam sebuah kehidupan bernegara bahwa Pimpinan sebuah lembaga negara yang baru memperkenalkan kepada Pimpinan Lembaga negara yang lain.

“*Courtesy call* juga kami lakukan dengan Presiden, Pimpinan MA dan Pimpinan BPK, sekarang kepada Pimpinan DPR,” katanya.

Pasalnya, menurut Ruki, karena KPK adalah sebuah komisi negara, tetapi jangan diartikan sebagai institusi yang setara dengan Dewan. Kehadirannya semata-mata hanya untuk memperkenalkan diri dan sebagaimana biasa banyak masukan dari Pimpinan Dewan dan Pimpinan Komisi III tentang kinerja KPK dan harapannya ke depan.

Secara lebih kongkrit, KPK ingin

membangun sebuah komunikasi yang lebih bagus dengan DPR dalam rangka menyelesaikan masalah, bukan

menyelesaikan kasus. Karena itu dia berharap, komunikasi ini jangan dianggap sebagai kong kalikong apalagi

perselingkuhan. “Itu jauh dari agenda kami,” tukas dia. (mp)/foto:iwan armanias/parle/hr

Yang Harus Diberantas Korupsinya, Bukan Remisinya



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon

Soal wacana pemberian remisi untuk koruptor, Wakil Ketua DPR-RI Fadli Zon turut menyampaikan pendapatnya. “Remisi bukanlah langkah mundur, saya kira itu adalah hak asasi.” ungkapnya saat diwawancarai usai pertemuan tertutup Pimpinan DPR-RI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (16/03) di lantai III Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta.

“Apakah narapidana tidak punya hak asasi, dan hak itu adalah remisi dan sebagainya. Itu diatur dalam Undang-Undang kita,” ungkap Pimpinan Dewan dari Fraksi Gerindra ini. Fadli juga menyatakan bahwa yang harus diberantas adalah pada korupsinya, bukan pada remisinya.

Pimpinan DPR Koordinator Polkam ini juga menyatakan bahwa justru yang bertentangan dengan Undang-Undang adalah PP 99/2012 itu sendiri. “Maka untuk membuat pelaku korupsi, narkoba, dan lain-lainnya itu jera, hukumannya yang ditambah dalam proses pengadilan atau sanksi dalam undang-undangnya,” ungkapnya.

PP No.99/2012 mengatur, setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi.

Sedangkan untuk memperoleh remisi yang terdapat dalam Pasal 34 ayat (2) dan (3) PP 99/2012, remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

Sementara persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan: “tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi dan telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.” (mp,ss)/

foto: denus/parle/hr

Tim Ekonomi Tidak Kapabel Naikkan Rupiah

Ekonomi nasional sedang sedikit goyah akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika. Padahal, di era SBY menjadi Presiden, rupiah tidak pernah terpuruk selemah sekarang. Ini menunjukkan tim ekonomi pemerintah tak memiliki *sense of crisis*.

Demikian penegasan Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto usai menerima kunjungan kehormatan Dubes Qatar untuk Indonesia di ruang kerjanya, Rabu (18/3). “Kami melihat tim ekonomi Jokowi terutama di Kementerian yang menangani ekonomi tidak memiliki *sense of crisis*. Tidak merasakan bagaimana ekonomi kita sedang menuju kepada kemerosotan yang tidak terhitung,” katanya.

Melemahnya nilai tukar rupiah ini tentu berdampak bagi masyarakat kecil. Ini terlihat dari masyarakat kecil yang mengonsumsi raskin semakin banyak. Apalagi mutu berasnya semakin menurun. Di sisi lain, Agus mengapresiasi pemerintah yang telah mencanangkan swasembada beras. “Itu bagus. Namun, jangan hanya mencanangkan saja. Harus disertai usaha untuk mendongkrak beras itu supaya betul-betul ada dan terjangkau tentunya,” nilai Agus.

Ketidaktekanaan pemerintah di bidang ekonomi juga terlihat dari pergantian sejumlah direksi di BUMN. Padahal, penggantinya belum tentu memiliki kapabilitas yang tepat di kursi direksi BUMN. Belum lagi Kementerian



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto

Kelautan dan Perikanan yang telah mengeluarkan kebijakan tak populis di tengah melemahnya rupiah. Ada kebijakan moratorium bagi kapal besar untuk mencari ikan di perairan Indonesia. Ini menyulitkan para nelayan.

Apalagi, kebijakan penghancuran kapal asing pencuri ikan juga masih kontroversial. Pasalnya, mungkin alutsista untuk mengebom kapal itu harganya lebih mahal daripada kapal



yang dibomnya sendiri. Kerusakan biota laut akibat pengeboman itu juga menjadi masalah lain. Semua ini, menurut Agus, merupakan bentuk ketidakpekaan pemerintah dalam membangun perekonomian di tengah melemahnya rupiah.

“Tim ekonomi Pak Jokowi betul-betul tidak mempunyai kapabilitas untuk menaikkan ataupun menstabilkan harga dollar. Dia hanya menebar pencitraan dan memperbanyak blusukan. Padahal, banyak kebijakan dan keputusan strategis yang ha-

rus diambil. Memang betul blusukan adalah pokok dari pengawasan. Tapi, apa yang mau diawasi kalau kinerjanya merosot terus. Jadi, kita memberikan kritik agar ada perbaikan di sektor ekonomi,” papar Agus. (mh) Foto: Iwan Armanias/Parle/hr

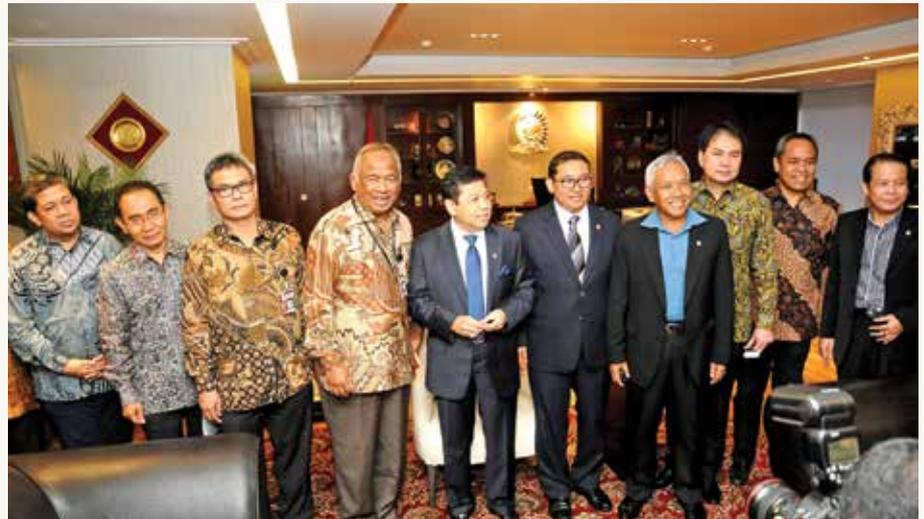
Silaturahmi KPK-DPR Tak Terkait Perppu Plt Pimpinan KPK

Silaturahmi antara Pimpinan KPK dengan Pimpinan DPR tidak terkait dengan Perppu Plt Pimpinan KPK. Perppu sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden dan DPR. Demikian ditegaskan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah usai menerima Pimpinan KPK Senin (16/3) di Jakarta. Dalam jumpa pers dia didampingi Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dan Fadli Zon sementara Plt Ketua KPK Taufiqurraman Ruki didampingi Johan Budi dan Adnan Pandupraja.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan, pihaknya sangat optimis, pada masa sidang DPR yang akan dibuka tanggal 23 Maret mendatang Perppu akan dibahas DPR, apakah akan diterima atau ditolak, meskipun secara joke, Pimpinan KPK berharap kalau bisa ditolak.

“Namun kita juga berharap, Pak Ruki dan kawan-kawan adalah orang-orang yang sangat dewasa dan sudah membangun KPK sejak awal dan yakin komunikasi antar lembaga yang akan dibangun akan jauh lebih baik. Bukan berarti kita melakukan satu kompromi, kolusi dan sebagainya, tetapi ada penataan dalam system pemberantasan korupsi baik dari sisi penindakan maupun pencegahan,” ujarnya.

Johan Budi mengakui banyak masu-



Pimpinan DPR RI foto bersama dengan Pimpinan KPK

kan dari DPR dan berjanji akan memperbaiki komunikasi tidak hanya kepada DPR tetapi juga kepada lembaga lain. Pihaknya akan menjalin hubungan yang berbeda dengan berkomunikasi lebih baik. Banyak masukan yang diterima dan akan menjadi bahan introspeksi oleh KPK sehingga bisa memperbaiki hubungan ke depan lebih baik dengan lembaga-lembaga penegak hukum lain.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menjelaskan, Perppu dan revisi UU KPK berbeda, Perppu adalah peraturan

pemerintah pengganti UU yang dikeluarkan Presiden, dengan opsi diterima atau ditolak DPR. Kalau diterima maka plt Pimpinan KPK sah menjadi Pimpinan KPK definitif hingga Desember 2015.

Sementara revisi adalah sarannya UU yang sudah ada sekarang, pembahasannya sesuai prosedur yang telah ditetapkan yaitu Prolegnas, kemudian disampaikan kepada Pemerintah dan dibahas bersama DPR. (mp)/foto:iwan armanias, denus/parle/hr

Qatar Berkomitmen Perhatikan TKI

Para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di negara-negara Arab selama ini kurang mendapat perlindungan yang memadai. Namun, TKI yang bekerja di Qatar relatif mendapat perlindungan dan kesejahteraan yang baik.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto saat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Qatar untuk Indonesia Mohammed Khater Al-Khater di ruang kerjanya, Rabu (18/3). Khater sendiri menyampaikan komitmennya bahwa Pemerintah Qatar selalu memberi perhatian sekaligus perlakuan yang baik kepada para TKI. Sampai saat ini, TKI yang bekerja di sektor informal masih dominan di

Qatar.

Kepada Khater, Agus menyampaikan bahwa kedua pemerintahan sama-sama berkomitmen melindungi TKI yang bekerja di Qatar. Kelak, pengiriman TKI informal ke Qatar akan dikurangi. Sebaliknya, para pekerja terampil yang bekerja di sektor formal akan lebih banyak dikirim. Para TKI itu akan dilatih terlebih dahulu, termasuk mempelajari bahasa Arab.

Dikatakan Khater, Pemerintah Qatar sangat menghargai para pekerja asing yang bekerja di negaranya. “Kami undang semua pekerja dari berbagai negara dan kami sediakan fasili-



tas kesehatan dan pendidikan,” ujar Khater.

Pada bagian lain, Agus juga menyampaikan penghargaan dan terima kasihnya kepada Pemerintah Qatar yang telah banyak memberi bantuan pendidikan kepada Indonesia. Qatar telah memberi banyak beasiswa bagi para mahasiswa Indonesia yang belajar di sejumlah Universitas di Qatar. Selain itu, beberapa pesantren di Tanah Air juga mendapat bantuan dari Pemerintah Qatar.

Kepada Agus, Khater bahkan minta diantar untuk melihat pesantren-pesantren di Jawa yang perlu mendapat bantuan. Ini merupakan bagian dari penguatan hubungan bilateral Indonesia-Qatar. (mh) Foto: Iwan Armanias/Parle/hr

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menerima Duta Besar Qatar untuk Indonesia

Qatar Pertanyakan Denda Indosat

Pemerintah Qatar lewat Duta Besarnya di Jakarta mempertanyakan denda yang selama ini dikenakan kepada PT. Indosat sebesar Rp1,3 triliun atas penyalahgunaan frekuensi 3G Indosat di 2,1 GHz. Namun, Qatar juga meminta bantuan DPR untuk memudahkan jalan investasi Qatar di bidang lainnya, selain telekomunikasi.

Demikian terungkap dalam perbincangan menarik saat Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menerima Dubes Qatar untuk Indonesia Mohammed Khater-Al Khater di ruang kerjanya, Rabu (18/3). Indosat menurut Agus sudah menjadi ikon kebanggaan Indonesia. Walau pun kini sahamnya dimiliki perusahaan Qatar, tapi pihak Indonesia masih bisa membicarakan persoalan Indosat dengan penuh persaudaraan dan ukuwah islamiyah.

Karena sudah menjadi keputusan pengadilan Indonesia, denda terhadap Indosat tetap harus dijalankan. Khater berharap ada penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak, agar Qatar bisa terus berinvestasi di Indonesia dengan nyaman. Diungkapkan Khater, ada 4.000 karyawan Indonesia di Indosat yang se-

lama ini terjaga dan terlindungi hak-haknya.

Selama dikelola oleh perusahaan asal Qatar, lanjut Khater, Indosat terus berkembang pesat. Tren positif Indosat ini justru membantu perekonomian Indonesia. Untuk itu, Qatar akan mengembangkan investasi lagi di Indonesia. Sejak 2008, jumlah investasi Qatar di Indonesia sudah mencapai 8 miliar USD.

“Kami mohon bantuan DPR untuk kemudahan investasi. Inshaallah akan datang lagi investasi lainnya dari Qatar,” ujar Khater. Indonesia, lanjut Khater, merupakan pasar yang sangat besar dan potensial untuk pengembangan bisnis dan investasi.

Sementara itu Agus mengatakan, persoalan Indosat akan dibicarakan di internal DPR, terutama dengan Komisi V dan VI. “Kami serius membahas hal ini. 4.000 pekerja Indonesia di Indosat harus terlindungi dan ini menyangkut kepentingan kedua negara,” kata Agus. Ke depan, pemerintah bisa membicarakan kembali peluang buyback untuk mengambil alih kembali Indosat. (mh) Foto: Iwan Armanias/Parle/hr



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto

Indonesia Harapkan Eropa Bebas Visa Kunjungan

Sebagai bagian dari penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Uni Eropa, Pimpinan DPR berharap agar Uni Eropa membebaskan visa kunjungan warga negara Indonesia yang ingin berkunjung ke Eropa. Bebas visa terutama ditujukan kepada negara-negara anggota Protokol Schengen.

“Dengan upaya penghapusan kewajiban visa ini, kita akan mendorong mobilitas berupa *people to people contacts*, sehingga menjadi dasar untuk mencapai kemajuan dalam pembangunan sosial ekonomi dan saling pengertian antara Uni Eropa dan Indonesia.” Demikian disampaikan Wakil Ket-



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menerima Delegasi Parlemen Uni Eropa dan DPR Agus Hermanto saat melakukan pertemuan dengan delegasi Parlemen Uni Eropa di DPR, Selasa (17/3).

Upaya pembebasan visa kunjungan ke Eropa ini bagian dari tindak lanjut penandatanganan Partnership and Cooperation Agreement sebagai payung hukum kerja sama politik, ekonomi, dan sosial budaya antara Indonesia dan Uni Eropa. Indonesia, kata Agus, harus memenuhi syarat resiprositas kepada 28 negara anggota Protokol Schengen. Beberapa negara anggota Protokol Schengen di antaranya Belanda, Denmark, Swedia, Austria, Belgia, Prancis, dan Estonia.

Pada bagian lain, Agus menyinggung soal neraca perdagangan. Data terakhir per Januari 2015, neraca perdagangan Indonesia dengan negara-negara Uni Eropa sebesar US\$ 1,18 miliar dengan nilai impor US\$ 1,01 miliar. Itu berarti mengalami surplus sebesar US\$ 170 juta. “Walaupun neraca perdagangan Indonesia terhadap Uni Eropa menunjukkan nilai positif, namun Indonesia bukan mitra dagang utama Uni Eropa di Asia Tenggara,” ungkap Agus. (mh) foto: iwan armanias/parle/hr

Belum Ada Urgensi Perlunya Wakil Panglima TNI

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan, sebagai wacana pernah dibicarakan soal jabatan Wakil Panglima TNI. Untuk itu dalam masa persidangan yang akan dibuka 23 Maret mendatang, Komisi I DPR bisa menanyakan kenapa mendesak perlu adanya jabatan Wakil Panglima TNI.

“Kita belum lihat ada urgensi yang memerlukan adanya nomenklatur baru itu. Artinya dari berbagai sisi, fungsi TNI sudah berjalan dengan baik. Kecuali mau membesarkan batalyon, alutista dan macam-macam,” ungkap Fadli kepada pers di Jakarta, Kamis (19/3).

Menurut Pimpinan DPR Koordinator Polkam ini, kalau alasannya untuk penguatan Poros Maritim Dunia, hingga kini pihaknya belum tahu. Kalau alasan itu masuk akal tentu tidak ada masalah. Dia berharap ada penjelasan dan ini diperlukan bukan sekedar mengadakan nomenklatur.

“Penjelasan kenapa Wakil Panglima TNI diperlukan. Kalau penjelasannya bagus, masuk akal dan memang diperlukan, saya kira tidak ada masalah,” kata Fadli.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyampaikan adanya rencana melakukan reorganisasi TNI. Salah satu hal yang ia sebut akan direalisasikan kembali adalah ja-



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon

batan wakil panglima di tubuh TNI. Moeldoko mengusulkan reorganisasi TNI itu kepada Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (17/3).

Jenderal Moeldoko menyatakan Presiden menyetujui reorganisasi TNI, asalkan dilakukan secara bertahap. Jabatan wakil panglima TNI sebelumnya sudah pernah ada, tetapi kemudian dihapus pada masa Presiden Abdurrahman Wahid. (mp)/foto: naefurodji/parle/hr

DPR Dorong Maluku Dapat PI Sepuluh Persen Blok Marsela

Pimpinan DPR RI mendorong Pemerintah Daerah Maluku untuk mendapat haknya sebesar sepuluh persen atas blok Marsela. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan usai menerima Gubernur Provinsi Maluku, Said Assagaf di ruang kerja Pimpinan DPR RI, Selasa (17/3).

“Hari ini kami menerima Gubernur Maluku membicarakan komitmen pemerintah untuk memberikan PI (*participating interest*) sebesar 10 persen kepada Pemda Maluku sebagai wakil dari masyarakat setempat,” jelas Agus Hermanto.

Ditambahkan Agus, sejatinya pembagian PI kepada Pemda menjadi wewenang dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM), namun sesuai UU No.22 tahun 2001 tentang Migas, daerah yang memiliki



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto saat diwawancara wartawan



potensi SDM diberikan hak kepentingan partisipasi sebesar 10 persen dari keseluruhan modal yang disetor bagi usaha eksplorasi. Sebagai wakil rakyat, diungkapkan Agus, pihaknya akan mendorong pemerintah (Kementerian ESDM) untuk bisa memenuhi tuntutan dari masyarakat Maluku.

“Menindaklanjuti permintaan dari Gubernur Maluku sebenarnya hal tersebut menjadi pembicaraan lama yang sudah selesai pembahasannya, namun kini Gubernur kembali membicarakannya mengingat konon ada isu yang berbeda. Dan kini Gubernur hanya menginginkan komitmen dari pemerintah. Ke depan kami (pimpinan DPR-red) akan mengundang Menteri ESDM untuk membicarakan hal tersebut,” papar politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini.

Sementara itu Said Assagaf mengatakan bahwa apa yang ia sampaikan kepada Pimpinan DPR itu merupakan permintaan masyarakat Maluku dan semata-mata untuk kepentingan masyarakat sekitar. Ia berharap pemerintah dapat memegang komitmennya.

Walaupun presiden berganti, dikatakan Said, namun pemerintah tetaplah pemerintah yang menaungi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga apa yang sudah dijanjikan pemerintah tahun sebelumnya adalah tetap menjadi komitmen pemerintahan ini, sehingga tetap harus diteruskan, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang No.22 Tahun 2001 tentang Migas dan PP No.35 tahun 2004. (Ayu)/foto:denu/parle/hr

Tim Ekonomi Presiden Tak Miliki Sense Of Crisis

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menilai tim ekonomi Presiden Jokowi masih bersikap tenang menghadapi penurunan ekonomi yang cukup drastis. Terbukti saat reses DPR sekarang ini banyak ditemukan masyarakat yang mengeluh lantaran harga beras naik dan kebutuhan pokok lainnya serta jumlah raskin yang sedikit. Tim kerja ekonomi Presiden tersebut dinilai tidak mempunyai *sense of crisis*.

Hal tersebut diungkapkan Agus Hermanto di lantai III Gedung Nusantara III Senin (16/3), usai menerima Pimpinan KPK. “Ekonomi kita memang betul-betul mengalami penurunan yang drastis. Di lain pihak pemerintah masih tenang dan menterinya mengatakan tidak terjadi apa-apa. Ini benar-benar menunjukkan sikap pemerintah yang tidak mempunyai *sense of crisis*, *sense*

of economy. Kami ingatkan bahwa tim ekonomi Jokowi harus benar-benar memikirkan ini,” ujar politisi Partai Demokrat ini.

Pimpinan Dewan Koordinator Industri dan Pembangunan ((Inbang) ini juga menegaskan, Tim Ekonomi Presiden Jokowi harus melakukan usaha supaya Indonesia bisa *rebound* dengan mengeluarkan kebijakan serta perbaikan ekonomi. Ia juga mengajak semua masyarakat Indonesia untuk ikut memperhatikan hal ini.

“Untuk itu kami menyerukan Tim Ekonomi Pak Jokowi harus betul-betul memperkuat pondasi ekonomi dan harus bekerja dengan keras supaya ekonomi kita bisa *rebound*. Ini harus dilakukan melalui kajian secara matang dan berharap semua pihak menyoroti kondisi ini termasuk media



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto

dan masyarakat,” ujarnya.

Salah satu langkah pemerintah adalah Presiden segera menggelar rapat kabinet yang membahas masalah ekonomi ini. Selama ini yang dilihat pemerintah melakukan blusukan, padahal blusukan tersebut adalah sebagian dari pekerjaan, terutama pengawasan.

“Menteri-menteri tidak perlu blusukan kesana kemari sehingga harga-harga kebutuhan pokok naik, sementara kondisi ekonomi malah menurun,” pungkas Agus menegaskan. (mp,ds)/foto:iwan armanias/parle/hr

Pembangunan Papua Harus Direalisasikan Sungguh-sungguh

Pembangunan Papua dan Papua Barat harus benar-benar direalisasikan dengan sungguh-sungguh dan menyeluruh yang mencakup pembangunan fisik dan masyarakat Papua sendiri. Pembangunan wilayah Indonesia Timur khususnya Papua dan Papua Barat hendaknya tidak hanya menjadi slogan pembangunan saja.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dalam kunjungannya ke beberapa daerah di Papua dan Papua Barat seperti Kota Monokwari, Kota Jaya Pura, Kabupaten Nabire dan Dogiyai didampingi Anggota DPR RI dari Komisi II asal Papua, Muhammad Yudi Kotouky dan Anggota Badan



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat audiensi dengan masyarakat Kabupaten Dogiyai

Anggaran DPR RI, Andy Akmal Fasluddin, baru-baru ini.

Fahri berharap pembangunan fisik, ekonomi dan sosial harus benar-benar direalisasikan untuk masyarakat Papua dan Papua Barat. Ia juga meminta agar pembangunan di wilayah Timur tidak hanya berhenti di Makassar dan Sulawesi Selatan saja tapi juga menjangkau wilayah propinsi di ujung Timur NKRI ini.

Ada persamaan antara Papua dengan daerah asal Fahri yaitu Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia secara gamblang mencontohkan, NTB, Papua dan Papua Barat memiliki tambang emas yang termasuk terbesar di dunia. Namun sayangnya indeks pembangunan manusia di kedua daerah itu selalu berada di paling bawah. "Ini terjadi karena pembangunan yang dilakukan tidak terkoordinasi dengan baik," kata Fahri.

Menurutnya, negara sesungguhnya punya kewajiban untuk menggerakkan sumber dana hingga wilayah paling Timur supaya daerah tersebut menjadi pusat pembangunan dan kegiatan ekonomi. Oleh sebab itu, Fahri menyarankan agar pembangunan di kedua wilayah Indonesia Timur itu diarahkan masuk ke sektor manufaktur dan jasa.

Pria kelahiran Sumbawa, NTB ini mengungkapkan, wilayah Papua kaya akan sumber daya laut disisi lain wilayah pegunungannya dengan iklim yang sangat baik berpotensi menjadi wilayah perkebunan dan peternakan. Kalau di daerah pegunungan dijadikan perkebunan kopi, teh dan apel organik tentu akan membawa kemakmuran bagi masyarakat di sana. "Iklim di Papua ini berkah Tuhan yang tidak bisa dibeli, sayang kalau tidak dimanfaatkan," jelasnya.

Selain itu Fahri mendorong agar masyarakat Papua bisa lebih berkiper di tingkat nasional. Ia mencontoh Presiden Jokowi yang berasal dari non militer dan pengusaha mebel, oleh karena itu masyarakat Papua seharusnya terpacu juga bahwa mereka bisa ikut berkontribusi di tingkat nasional.

"Saya yakin orang Papua atau siapapun bisa menjadi Pe-

mimpin di Republik ini. Dikotomi Pemimpin harus dari orang Jawa dan Militer perlahan sudah tidak harus lagi. Orang Papua harus mampu menjadi etalase bagi masyarakat Papua lainnya di tingkat nasional," jelas Pria yang dikenal lugas.

Bandara Internasional Biak

Untuk menghidupkan perekonomian dan pembangunan di Papua, Fahri berharap agar Bandara Internasional Biak bisa dikembalikan fungsinya seperti dulu yaitu menjadi tempat transit masyarakat yang ingin menuju Honolulu, Amerika Serikat, Jepang juga negara-negara di wilayah Timur lainnya.

Fahri berpendapat, penerbangan ke luar negeri selama ini cenderung lewat Singapura, padahal jika lewat Biak maka perjalanan akan lebih singkat. Apabila Biak menjadi bandara internasional maka bandara-bandara pendukung lainnya di Papua juga harus dibangun sehingga masyarakatnya maju dan modern.

Untuk membantu jalinan komunikasi antara pusat dan daerah Fahri bersedia menjadi bagian demi kemajuan wilayah Indonesia Timur tersebut. "Bisa juga digerakkan kampanye membangun Indonesia Timur," katanya.

Anggota DPR RI dari Komisi II asal Papua, Muhammad Yudi Kotouky berharap agar semakin banyak pejabat pusat yang berkunjung ke Papua supaya mereka memahami persoalan yang dihadapi rakyat di Indonesia Timur. Sejak Papua masuk menjadi bagian dari NKRI tahun 1963 sampai sekarang tahun 2015, Papua masih belum banyak mengalami perubahan bahkan masih terbelakang.

Sementara anggota Badan Anggaran DPR RI, Andy Akmal Fasluddin berjanji untuk memperjuangkan anggaran pembangunan Papua. "DPR akan lebih mengawasi agar anggaran yang dikurcurkan nantinya akan lebih efektif dan dirasikan oleh masyarakat Papua," tandasnya. (tt) foto: dok/parle/tt

Koperasi Setjen DPR RI Miliki Potensi Market Untuk Dikembangkan



Suasana Rapat Anggota Tahunan Koperasi 2015 Setjen DPR RI

Koperasi Setjen DPR RI memiliki potensi pasar yang besar dan bisa dikembangkan guna meningkatkan kesejahteraan para anggota Koperasi.

"DPR ini memiliki potensi market yang besar dimana ada PNS sebesar 1500 orang, non pns bahkan bisa mencapai 5000 orang kedepan. Begitu juga PNS DPD, dan MPR," jelas Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti saat membuka Rapat Anggota Tahunan Koperasi 2015, di Gedung Nusantara, Kamis, (19/3).

Menurut Win, hampir 90 persen anggota berpartisipasi dalam kegiatan simpan pinjam. "Itu harus dipertahankan oleh pengurus dan anggota koperasi agar memiliki peran lebih besar lagi. Kita tahu ada berbagai jenis simpanan wajib, sukarela, pensiun, dan si jago yang sifatnya lebih produktif," jelasnya.

Oleh karena itu, harap Win, jika para anggota koperasi memiliki rezeki lebih sebaiknya dimasukkan kedalam Koperasi. "Jadi Kalau ada rezeki jangan dimasukkan semua ke Bank tetapi ke-koperasi," katanya.

Dia mengharapkan, Koperasi Setjen DPR RI dapat membawa manfaat sebesar-besarnya bagi anggota dan membawa manfaat bagi anggotanya.

"Kita juga memiliki tantangan diantaranya adanya usaha

persiapan, dan darma wanita yang harus dikembangkan, jadi memang ada beberapa unit bisnis yang tidak mungkin kita anakirikan satu dengan yang lainnya,” jelasnya.

Dia meminta pengurus koperasi dapat meningkatkan kinerja Koperasi Setjen DPR RI agar ke depan dapat semakin memberikan manfaat bagi anggotanya. “Saya meminta Koperasi juga mengutamakan legal aspek formal khususnya mengenai pendirian Koperasi yang harus terdaftar dan memiliki akte Koperasi, dimana harusnya sejak tahun 2006 dinotariskan segera, jadi saya berharap ini dapat dibereskan payung hukumnya agar lebih terlindungi dalam menjalankan tugas dan fungsi koperasi kedepannya,” katanya.

Ketua Pengurus Koperasi Muhammad Djazuli menga-

takan, Di dalam kegiatan simpan pinjam Koperasi Setjen DPR RI menggunakan hampir 56 persen modal sendiri dan sisanya menggunakan modal luar sebesar 44 persen. “Kita memiliki program kilat untuk pinjaman bagi anggota yang sakit dan pembiayaan sekolah, dengan bunga terkecil sebesar 0.7 persen,” katanya.

Djazuli menambahkan, Koperasi Setjen DPR RI akan meningkatkan kinerja di sektor Unit Simpan Pinjam dan sektor *real*. Saat ini, Koperasi memberikan Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar 2.5 Miliar. “Pendapatan bruto Koperasi sebesar 8 Miliar, dan beban 5.4 miliar,” terangnya. (Sugeng), foto : naefurodje/parle/hr.

DPRD Kabupaten Muna Konsultasikan Peran Bamus

Badan Musyawarah (Bamus) hampir kehilangan peran di DPRD. Para anggota DPRD juga tak beminat menjadi anggota Bamus. Sebaliknya, menjadi anggota Banggar di DPRD begitu favorit. Setidaknya inilah yang terjadi di DPRD Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Sebanyak sepuluh orang anggota DPRD Muna menemui Deputy Persidangan dan KSAP DPR Tatang Sutarsa untuk berkonsultasi dan bertukar informasi seputar peran Bamus di DPR RI dan DPRD. Menurut Tatang, Bamus punya peran sangat strategis dalam mengatur jadwal persidangan di DPR RI. Rapat Bamus di DPR diplot setiap hari Kamis. Mereka yang duduk di Bamus adalah Pimpinan DPR dan fraksi.

Bila Bamus sudah mengagendakan rapat, itu harus dijalankan oleh semua Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Dan AKD yang sudah menyelesaikan agenda harus lapor ke Bamus. Bila Bamus belum terbentuk atau tidak memenuhi kuorum, ada Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus. Jadi semua mekanisme di DPR RI tetap berjalan dengan baik.

Ketua DPRD Muna Mukmin Naini (F-PAN) yang memimpin delegasi, mengatakan, Bamus di DPRD hampir



Deputi Persidangan dan KSAP DPR Tatang Sutarsa saat menerima DPRD Kabupaten Muna

kehilangan peran strategisnya. Diakui Mukmin, pemahaman para anggota DPRD tentang peran Bamus tak sebaik di DPR RI. “Bamus di DPRD tidak strategis dan tidak punya peran apa-apa. Itu terlihat saat kita melakukan penyusunan alat kelengkapan. Para anggota fraksi berlomba-lomba menjadi anggota Banggar. Menjadi anggota Bamus DPRD tak ada yang bisa dikerjakan,” papar Mukmin.

Setelah mendapat penjelasan rinci dari DPR RI, ia mengaku akan membicarakan kembali dengan para anggota DPRD untuk menghidupkan peran

strategis Bamus. Selama ini, Bamus di daerah hanya mengagendakan rapat paripurna, selebihnya tak ada lagi. Komisi di DPRD juga biasanya langsung berkomunikasi ke Pimpinan DPRD, tidak melalui Bamus lagi bila menyangkut agenda dan jadwal rapat.

Peran Bamus yang hilang di DPRD, kata Mukmin, sudah turun temurun dari keanggotaan periode sebelumnya. Para anggota lebih tertarik menjadi anggota Banggar, karena selalu bertemu dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam membahas anggaran. (mh) foto: iwan armanias/parle/hr

BUMN Hanya Wajib Salurkan PKBL

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hanya dapat menyalurkan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), bukan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Namun kondisi di lapangan,

masih ada perusahaan BUMN yang menyalurkan CSR saja, atau malah menyalurkan keduanya, yaitu PKBL dan CSR.

Hal ini menjadi temuan Tim Kunjung-

an Kerja Komisi VI DPR di Provinsi Sulawesi Utara, yang dimulai pada Senin (16/03/15) lalu. Bahkan, Wakil Ketua Komisi VI Azam Natawijana, yang sekaligus memimpin Tim



Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Azman Natawijana

Kunker, harus menegaskan berkali-kali landasan apa yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan BUMN.

“Menurut Undang-undang BUMN,

yang wajib dijalankan oleh BUMN itu PKBL. Sedangkan, program CSR hanya boleh disalurkan oleh perusahaan swasta. Dana PKBL diambil dari deviden negara,” tegas Azam saat rapat dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, BUMN Perbankan, Permodalan Nasional Madani, serta perusahaan penjaminan, di Kantor Perwakilan BI di Manado, Selasa (17/03/15).

Politisi asal Dapil Jawa Timur III menegaskan, kekeliruan ini dimulai oleh mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan saat mengeluarkan surat keputusan mengenai PKBL. Namun, sebagai tindak lanjut kekeliruan ini, Komisi VI DPR telah meminta kepada Menteri BUMN

Rini Mariani Soemarno Soewandi agar mencabut surat keputusan tersebut.

“Kekeliruan ini bisa menjadi temuan BPK, jika BUMN menyalurkan keduanya. Jadi saya tegaskan BUMN hanya bisa menyalurkan PKBL bukan CSR. PKBL bisa disalurkan untuk sektor pendidikan, sosial, kesehatan dan dunia ekonomi yang dirasa perlu mendapat bantuan,” tambah Azam.

Politisi Partai Demokrat ini menegaskan berkali-kali dalam beberapa kali rapat dengan perusahaan BUMN di Provinsi Sulut. Pasalnya, masih banyak perusahaan yang ternyata menggunakan CSR, bahkan keduanya. (sf) foto:

sofyan/parle/hr

Perbankan Tanah Air Belum Siap Hadapi Persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN

Ketua Panja Revisi UU Perbankan Komisi XI DPR RI, Gus Irawan Pasaribu, menilai Perbankan tanah air belum siap menghadapi persaingan di Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Ketidaksiapan baik dari suku bunga tidak kompetitif, keragaman produk, dan tidak efisien-nya bank menjalankan bisnis.

Suku bunga tinggi ini dianggap tidak relevan dengan rate negara di ASEAN yang hanya 4-5 persen. Sedangkan, bank di Indonesia mengontrol bunga 6-12 persen. “Secara keseluruhan kami anggap masih sangat tidak siap. Peran otoritas mendorongnya,” katanya saat pertemuan dengan Pejabat Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pasar Modal Asuransi, dan Perbankan, Senin (16/3), di Makassar.

Pertemuan tersebut untuk meminta masukan terhadap revisi RUU Perbankan yang kembali bergulir dan dipastikan bisa disahkan tahun ini.

Otoritas, katanya, juga harus melakukan “intervensi” pembatasan suku bunga utamanya Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dengan kondisi tersebut, Gus menilai ide *holding* perbankan cukup relevan untuk mendorong peran perbankan bersaing menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Ada tiga bank pelat merah yang diusulkan bersatu membentuk *holding* untuk kerja sama bisnis strategis di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Gus yang juga Wakil Ketua Komisi XI DPR RI menjelaskan, pembahasan RUU memprioritaskan pengurangan bobot kepemilikan asing pada bank dalam negeri. Dia menilai investor asing sudah terlalu bebas memiliki bank di Indonesia.

“Tetapi bank tidak cukup sulit jika ingin ekspansi ke negara mereka,” jelasnya. Hanya saja, batas kepemilikan yang diajukan belum final tetapi rencananya hanya 40 persen, kemudian kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia harus berbadan hukum perseroan terbatas. (andri) foto: andri/parle/hr



Wakil Ketua Komisi XI DPR Gus Irawan Pasaribu

Komisi VII DPR: Masalah Kontrak Kerja Sama Jadi Isu Penting di RUU Migas

Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha mengatakan masalah Kontrak Kerja Sama (KKS) menjadi isu penting dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas).

Hal itu disampaikan Satya Yudha di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/3) dalam acara Forum Legislasi bertajuk ‘Revisi

UU Migas’. Selain Satya Yudha hadir pula anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Gerindra, Ramson Siagian dan penasihat Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto.

Menurut Satya Yudha, selama ini kontrak di sektor migas bersifat *lex specialis* atau khusus. Sehingga, jika ada aturan seperti UU yang baru lahir setelah kontrak dibuat, tak bisa me-*legitimate* kontrak yang sudah ada. Ciri seperti ini

telah ada dalam UU Migas. Menurutnya, kontraktor paling senang dengan sifat kontrak seperti ini.

“Jangan sampai kontrak bikin kebal atau *lex specialis*. Masalah kontrak jadi isu tersendiri, supaya kedaulatan semangatnya sama dengan yang diinginkan Mahkamah Konstitusi (MK),” katanya.

Atas dasar itu, Satya yang juga politisi dari Partai Golkar itu menyarankan agar dilakukan *stabilization clause* untuk memodifikasi perjanjian hukum dalam setiap kontrak migas.

la percaya, klausul ini dapat melindungi kepentingan investor jika terdapat UU baru. Tujuan klausul ini agar bisa menyeimbangkan manfaat atau mempertahankan keseimbangan ekonomi dari tanggal efektifnya kontrak. “(Investor) Diberi hak untuk berbicara ke pemerintah, jika ada UU baru dan menyebabkan kontraknya tidak ekonomis lagi,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi VII Ramson Siagian mengatakan, perubahan status ini menjadi isu penting mengingat sistem yang dilakukan SKK Migas tak berjalan efektif. Hal ini terlihat dari penurunan lifting minyak domestik dari 1,4 juta barel per hari menjadi 780 barel per hari.

Ditambah lagi, pengguna BBM di Indonesia tak bisa menggunakan produksi domestik, sehingga harus impor. Akibatnya, impor terus bertambah dan mempengaruhi posisi rupiah. Hal ini semakin mengganggu ketahanan energi Indonesia.

“Kalau pada saat cadangan devisa menurun karena cadangan impor bisa mempengaruhi posisi rupiah. Kemudian ketahanan energi kita berkurang. Ini yang harus dilihat kalau mau merevisi UU Migas,” kata Ramson.

Sementara itu, Penasihat Reforminer Pri Agung Rahmanto sepakat bahwa status kedudukan peran dan fungsi SKK



Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha dalam acara Forum Legislasi

Migas menjadi isu penting dalam revisi UU. Menurutnya, bentuk badan di level hulu menjadi ruh di UU Migas. Sektor hulu terkait dengan aspek penguasaan dan pengusahaan. “Kalau hilir justru lebih ke aspek pengaturan regulasi,” ujarnya.

Dosen Fakultas Teknologi Kebumihan dan Energi (FKTE) Universitas Trisakti itu menambahkan, peran fungsi dan kedudukan lembaga mesti memenuhi aspek konstitusi. Pasalnya konstitusi menginginkan penguasaan pada tingkat pertama. Indonesia memiliki aset sumber daya alam yang melimpah.

Itu sebabnya, lanjut Pri Agung, semestinya negara yang mengelola Migas, bukan pihak ketiga. “Yang kita perlukan hulu migas, bukan badan pengawas dan lembaga regulator, tetapi entitas otoritas usaha yang bisa dilakukan sendiri, atau kalau karena keterbatasan bisa kerjasama dengan pihak lain,” katanya. (nt/sc) foto: dok/parle/hr

DPR Targetkan RUU Perbankan Rampung Tahun 2015



Suasana rapat Tim Panja RUU Perbankan dengan mitra kerja di Makassar

Tim Komisi XI DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan untuk menghimpun masukan mengenai revisi Undang-Undang Perbankan yang dinilai terlalu liberal, ditargetkan bisa rampung pada 2015.

“Kami targetkan revisi Undang-Undang (UU) Perbankan tersebut rampung tahun ini,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI H Gus Irawan Pasaribu, ketika mengadakan pertemuan dengan Bank Indoneaia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), KADIN, dan Bank-bank di Sulawesi Selatan (Makassar), Senin (16/3).

Anggota Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) daerah pemilihan Sumatra Utara itu berada di Sulawesi Selatan, bersama dengan enam anggota Komisi XI DPR RI lainnya dalam rangka kunjungan panja perbankan untuk mendapat berbagai masukan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya di sektor perbankan dan keuangan.

“Saya memimpin Panja, dan tujuan saya mengajak rekan-rekan di Komisi XI datang ke Sulawesi Selatan sebagai bagian dari meminta masukan dari perbankan di daerah ini untuk menjadikan bahan pertimbangan merevisi Undang-undang no 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang no 7 tahun 1992, karena sangat liberal bahkan bertentangan dengan UUD 45. Ukurannya adalah kepemilikan asing yang tanpa batas.

Tim Panja Perbankan Komisi XI DPR RI dipimpin oleh H. Gus Irawan Pasaribu (P. Gerindra), dan didampingi Henky Kurniadi (PDI-Perjuangan), Arlangga Hartanto (P. Golkar),

Willgo Zainar (P. Gerindra), Anna Mu'awanah (PKB), Amir Uskara (PPP), Achmad Hatan (P. Nasdem). (Andri), foto : andri/parle/hr.

Penerimaan Sektor Tambang Belum Mampu Ciptakan Kesra

Indonesia merupakan negeri yang kaya dengan sumber daya alam namun disisi lain sebagian rakyat Indonesia masih di bawah garis kemiskinan. Dan potensi sumber daya alam khususnya tambang yang dimiliki belum mampu menciptakan kemandirian dan kesejahteraan rakyat.

"Perlu kajian analisis yang berkaitan dengan potensi ekonomi khusus sumber daya alam dari sektor pertambangan, dan permasalahannya serta kebijakan yang perlu ditempuh pemerintah dalam mengatasi persoalan tersebut dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pertambangan," kata Plt. Kabag Analisa Pendapatan dan Belanja Negara Setjen DPR Mardi Harjo, saat membuka diskusi dengan tema "Penerimaan Negara Sektor Pertambangan Minerba", di Gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Senin (16/3).

Jika menyimak UUD 1945 Pasal 33 hasil tambang harusnya dapat dipakai mendorong peningkatan kesejahteraan dan hajat hidup orang banyak, hanya saja jika melihat komposisi sumber pendapatan APBN sebagian besar justru pendapatan negara didapat dari penerimaan pajak.

Sedangkan Pendapatan Negara yang diperoleh dari PNB jauh lebih kecil, sektor pertambangan hanya menyumbang 6,09%. Dan sektor migas 54,02% pada tahun 2014.

"Sebenarnya yang menjadi permasalahan adalah pengelolaan tambang Indonesia, yang seharusnya pengelolaan hasil tambang dapat memberikan kontribusi positif kepada kepentingan publik dan sewajarnya Indonesia mendapatkan manfaat yang proporsional dari tambang yang dimiliki," tegas Mardi Harjo.

Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batu bara Kementerian ESDM Sujadmiko, menjelaskan bahwa PNB pertambangan diharapkan meningkat pada tahun 2015 sebesar Rp. 52,2 Triliun, maka ada aspek yang akan diterapkan pemerintah untuk mencapai optimalisasi penerimaan negara tersebut. Namun Sujadmiko mengatakan, hal tersebut menimbulkan konsekuensi yang dipandang berat, karena harus juga memberikan ruang fiskal yang memadai bagi pelaku tambang. "Kalau penge-nanaan kewajiban keuangan terlalu berat dikhawatirkan akan terjadi pengurangan kegiatan (trade off) di lapangan," ungkapnya. (as) foto: rizka/parle/hr



Plt. Kabag Analisa Pendapatan dan Belanja Negara Setjen DPR Mardi Harjo

Industri Mebel dan Kerajinan Jangan Hanya Jago Pameran

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Heri Gunawan menilai industri mebel dan kerajinan nasional saat ini jangan terjebak dalam acara seremonial dari pameran ke pameran. Pemerintah harus bekerja lebih keras menggenjot industri ini untuk meningkatkan pemasukan negara termasuk lapangan kerja.

"Industri mebel dan kerajinan nasional bisa naik kelas, kalau Pemerintah Joko-Kalla mampu membuat industri ini mandiri dan kuat. Kita punya bahan baku yang melimpah, SDM yang hebat seharusnya bisa tumbuh besar dan terdepan, tidak sekedar jago pameran saja," katanya di Jakarta, Sabtu (14/3/15) menanggapi pelaksanaan "Internasional Furniture and Craft Fair Indonesia" (IFFINA) yang dibuka Presiden Jokowi.

la menyebut data tahun 2013, nilai

ekspor industri mebel dan kerajinan Indonesia berada di posisi 13 tertinggal dari Vietnam yang bertengger di nomer 4. Kemudian tahun 2014, nilai ekspor Indonesia 2 miliar dolar AS jauh di bawah Vietnam yang mencapai 6 miliar dollar AS.

Sementara data dari Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (AMKRI) menunjukkan sekitar 2,5 juta tenaga kerja langsung dan tenaga tidak langsung terserap di Industri ini. Jadi sudah semestinya pemerintah memberikan perhatian khusus pada sektor strategis dan padat karya ini.

"Pemerintah Joko-Kalla mesti memandang industri ini penting terhadap pertumbuhan perekonomian nasional yang mampu berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan pencetak



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Heri Gunawan

devisa negara, apalagi ditengah harga dollar yang naik tinggi, ini peluang bagus," tandasnya.

Bentuk-bentuk perhatian khusus pemerintah menurut Heri, bisa berupa

pemberian insentif pajak, pembukaan akses permodalan, dan penguatan kapasitas SDM lewat pembinaan terkait disain produk yang lebih kreatif dan *fully local content* (Indonesian heritage), pemasaran serta perlindungan kepada pengrajin misalnya dari serbuan produk asal Tiongkok yang sangat murah.

Ia meyakini dengan langkah tersebut Indonesia berpeluang besar menjadi produsen meubel dan kerajinan terbesar di kawasan regional (ASEAN). Bahkan khusus untuk produk berbasis rotan Indonesia bisa menjadi yang terbesar di dunia.

“Industri ini berpeluang tumbuh

lebih besar dan menjadi yang terdepan di kawasan regional dan international. Vietnam dan Malaysia aja bisa, masa Indonesia yang punya bahan bakunya nggak bisa. Kalau pemerintah serius dan sungguh-sungguh, pasti bisa!” pungkas Heri Gunawan. (iky) foto: andri/parle/hr



Ketua Panja Perbankan Komisi XI DPR Gus Irawan Pasaribu

Sebagaimana diketahui UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebetulnya merupakan warisan IMF pada saat terjadi krisis moneter di Indonesia. Oleh karenanya UU Perbankan sangat liberal, dimana hampir tanpa batas asing boleh memiliki bank di Indonesia.

“Oleh karena itu kita merasa penting untuk merevisi UU Perbankan dengan semangat Indonesia,” kata Ketua Panja Perbankan Komisi XI DPR Gus Irawan Pasaribu saat pertemuan dengan Kepala Perwakilan BI Jawa Timur, Kepala Otoritas 3 OJK Jawa Timur, Kadin Jawa Timur dan jajaran Perbankan di Kantor Perwakilan BI Surabaya, Jatim, Kamis (19/3).

Menurut Gus Ir, demikian sapaan akrabnya, Dewan juga ingin ada azas resiprokal dalam UU Perbankan, jika asing boleh a, b, c dan d disini tentunya kita juga menuntut bisa a, b, c dan d di negara lain.

Dijelaskan Gus Ir yang juga Wakil Ketua Komisi XI, melalui UU ini diharapkan bisa mendorong efisiensi di sektor perbankan dan menciptakan sistem perbankan yang kuat.

“Sebagaimana diketahui di Indonesia hanya ada dua bank yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Apakah keduanya ini turut berkontribusi terhadap operasional perbankan kita yang dinilai tidak efisien,” paparnya.

“Akhir tahun ini kita akan berada di Masyarakat Ekonomi

Dewan Ingin UU Perbankan Semangat Indonesia

Asean (MEA). Saya pribadi melihat sesungguhnya industri perbankan kita belum siap dengan perbankan Asean,” tambah politisi dari Partai Gerindra ini.

Gus Ir menambahkan, suku bunga kredit di perbankan Asean rata-rata 3-7%, Indonesia sampai dua digit bahkan sampai 30%. Dan suku bunga dana 2-4%, sementara di Indonesia masih dua digit juga.

Selanjutnya, kata Gus Ir, Dewan juga ingin penguatan disisi regulator untuk bank yaitu BI sebagai bank central dan OJK. “Kita ingin kedua regulator ini kuat, sinergitas tercipta di kedua regulator ini,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gus Ir menyatakan secara empiris yang sering kali membuat sistem makro kita tidak stabil itu lebih banyak disebabkan oleh sistem keuangan.

Gus Ir yang didampingi 11 anggota Panja Perbankan Komisi XI DPR, mengharapkan melalui pertemuan dengan jajaran perbankan tersebut mendapatkan masukan agar bisa melahirkan UU Perbankan dengan semangat Indonesia menuju sistem perbankan yang kuat dan menjaga kestabilan makro.

Anggota Panja Perbankan Komisi XI DPR yang turut serta dalam pertemuan ini, antara lain Fadel Muhammad (Ketua Komisi XI), Marwan Cik Asan (Wakil Ketua Komisi XI), Indah Kurnia dan Andreas Eddy Susetyo (F-PDIP), Evi Zainal Abidin (F-PD), Sungkono (F-PAN), Bertu Merlas (F-PKB), Ecky Awal Mucharam dan Zulkieflimansyah (F-PKS), Kasriah (F-PPP), dan Donny Imam Priambodo (F-Nasdem). (sc) foto: suciati/parle/hr

Setjen DPR Bangun Potensi Pegawai

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI sedang membangun potensi para pegawainya lewat pelaksanaan Diklat. Di lembaga politik seperti DPR dibutuhkan SDM handal dan cakap untuk mengikuti ritme perkembangan politik yang sangat dinamis.

Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti saat membuka Diklat Pengembangan Kompetensi Eselon

III, Senin (16/3), menyampaikan, setiap pegawai harus mengenali potensi sekaligus kelemahan dirinya. Ke depan dibutuhkan para pegawai handal dan cakap untuk menjawab tantangan masa depan. Diklat yang diikuti 20 peserta dari eselon III ini berlangsung hingga 20 Maret di ruang Diklat DPR.

“Ya ini merupakan penyegaran dari rutinitas kita, sekaligus mengingatkan

kembali bahwa ada aturan-aturan baru yang terkait dengan jabatan yang berikutnya yang akan diemban. Tentu semua berharap ada pergantian pegawai. Bila saya pensiun tentu akan diganti dengan generasi yang lebih muda,” kata Win usai membuka Diklat.

Di tengah moratorium PNS saat ini, Diklat menjadi sangat strategis untuk memberdayakan para pegawai yang



Suasana Diklat Pengembangan Kompetensi Eselon III Setjen DPR RI

ada. Para pegawai eselon III dituntut mampu memahami berbagai macam peraturan yang berlaku saat ini. Apalagi, bekerja di lembaga politik seperti DPR akan selalu memunculkan hiruk pikuk politik. Pegawai Setjen tak boleh terbawa arus politik yang terjadi di DPR. Sebaliknya, harus menjaga netralitas dan profesionalismenya dalam bekerja.

Dijelaskan Win, para pegawai eselon IV-III bekerja di wilayah teknis. Sementara eselon II-I bekerja di wilayah pengambil kebijakan. Mereka yang kini berada di eselon III tentu akan naik ke eselon II. Dibutuhkan modal prestasi kerja yang baik untuk menaiki tangga eselon. “Nah, untuk duduk di jabatan ekselon II yang bisa mengambil kebijakan, tentu harus memiliki landasan yang kuat, seperti harus jujur, adil, dan memiliki kepribadian yang kuat,” ungkap Win. (mh, gt, rn) Foto: Naefuroji/Parle/hr

Pemerintah Harus Tegas Atas Maraknya Nikah *Online*

Anggota Komisi VIII DPR RI, Endang Maria Astuti meminta Kementerian Agama mengambil langkah tegas dan konkrit atas maraknya nikah online. Hal tersebut diungkapkannya kepada Parleментарia, Kamis (19/3).

“Nikah online jelas tidak sah karena merujuk kepada syar’i hal tersebut jelas tidak memenuhi persyaratan nikah seperti hadirnya wali nikah, saksi perkawinan dan mas kawin. Sementara dalam pelaksanaan nikah online konon semua itu tidak terlihat langsung,” jelas Endang.

Ditambahkannya, Nikah Online ini jelas akan sangat merugikan kaum wanita, mengingat resiko terjadinya penipuan atau kebohongan sangat besar. Sementara itu tidak ada pegangan yang dapat dijadikan alat bukti oleh wanita akan adanya pernikahan.

Bahkan, lanjut Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini, dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 saja tidak mengakui nikah siri, apalagi fenomena nikah online dimana mempelai, wali nikah dan saksi tidak berada dalam satu tempat.

Pihaknya berharap Kementerian agama dapat segera bertindak atas fenomena ini agar tidak sampai terus merebak. Hal ini semata demi kemaslahatan umat. Menurut Endang salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan pembinaan langsung kepada masyarakat. Pembinaan tidak hanya dilakukan kepada masyarakat, namun juga kepada ulama agar diteruskan kepada masyarakat setempat.

“Nikah itu bukan untuk melampiaskan hawa nafsu atau kebutuhan biologis tetapi untuk membentuk sebuah keluarga utuh. Kalau dengan nikah online, tidak hanya perempuan yang dirugikan, anak pun akan ikut tidak terlindungi hak-haknya. Begitupun dengan nikah siri, meskipun diijinkan secara syar’i namun, hak-hak perempuan dan anak dalam



Anggota Komisi VIII DPR Endang Maria Astuti

sistem Negara akan hilang. Disinilah juga diperlukan peran ulama untuk memberi masukan kepada masyarakat yang berniat atau yang telah melakukan nikah siri untuk segera mendaftarkan pernikahannya kepada Negara,” papar politisi dari Dapil Jawa Tengah IV ini. (Ayu) foto: iwan armanias/parle/hr

Pemerintah Tak Miliki Konsep Kuat Hadapi Dolar



Ketua Komisi VI DPR RI Achmad Hafisz Tohir

Pemerintah dinilai tak memiliki konsep yang kuat untuk menghadapi dollar yang kerap menggerus nilai tukar rupiah.

Secara substansi, empat kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk menguatkan rupiah sebetulnya sangat baik. Hanya saja kebijakan yang baru dikeluarkan sekarang itu dinilai sebagai bentuk kepanikan.

Ketua Komisi VI DPR RI Achmad Hafisz Tohir (dapil Sumsel I) mengemukakan hal tersebut kepada Parlemen, Jumat (20/3). "Pemerintah belum memiliki konsep yang kuat untuk menghadapi menguatnya dollar dan melemahnya rupiah," nilai politisi PAN tersebut.

Empat paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah itu, pertama, peningkatan kadar biofuel dalam biosolar dari 10 persen menjadi 15 persen. Kedua, penerapan bea masuk antidumping sementara dan bea masuk tindak pengamanan. Ketiga, perjanjian bebas visa dengan 30 negara baru. Keempat, pemberian insentif pajak.

Mengomentari bea masuk antidumping, Hafisz menilai, kebijakan itu sebetulnya sangat baik untuk di dalam negeri tapi akan bereaksi negatif bagi mitra dagang Indonesia di luar negeri. Hafisz juga menilai positif kebijakan penerapan peningkatan kadar biofuel untuk biosolar. "Itu ide yang bagus. Bahkan, saya pernah menyampaikan hal ini kepada Meneg BUMN Rini Soemarno dalam raker dengan 35 BUMN, termasuk juga ide pemakaian rupiah dalam transaksi antar-BUMN.

(mh) Foto: iwan armanias/parle/hr

DPR Sinyalir Ada Korupsi Dalam Pembangunan Hanggar Kalibrasi Hasanuddin



Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR meninjau robohnya Hanggar Kalibrasi di Bandara Hasanuddin, Makassar

Komisi V DPR mensinyalir adanya korupsi dibalik robohnya Hanggar Kalibrasi di Bandara Hasanuddin, Makassar.

"Terlihat adanya regulasi yang diakali birokrat padahal *closing* anggaran itu pada 30 Desember 2014, namun mereka mengajukan adendum itu 50 hari dimana pekerjaannya hanya 2 persen selesai, mestinya 100 persen," ungkap Anggota Komisi V DPR Miryam S. Haryani kepada parlemen baru ini.

Menurutnya, hal ini jelas sekali ada permainan, bahkan pada sisa pekerjaan yang kedua, dilakukan tanpa proses tender dan dikerjakan oleh kontraktor yang sama. Ini korupsinya ada," tegasnya.

Dia menegaskan kembali, Komisi V DPR akan segera memanggil Kementerian Perhubungan untuk melakukan investigasi dan jika ada sumber korupsi

akan segera dilaporkan KPK.

“Kita akan panggil kementerian perhubungan untuk melakukan investiga-

si dan bila terjadi sumber korupsi kita laporkan KPK. Mereka harus tanggung jawab baik kementerian perhubungan

maupun kontraktor, korban juga harus disantunin secara layak,” jelasnya. (Sugeng), foto : sugeng irianto/parle/hr.

Komisi V DPR Panggil Menhub Terkait Robohnya Hanggar

Wakil Ketua Komisi V DPR Michael Watimena akan segera memanggil Kementerian Perhubungan setelah reses nanti, untuk menjelaskan hasil audit mereka terkait robohnya hanggar Kalibrasi di Bandara Hasanuddin, Makassar.

“Setelah masuk tanggal 23 Maret, kita akan menggali lagi persoalan ini dengan mengundang Menteri Perhubungan dan jajaran terkait untuk menjelaskan robohnya hanggar Kalibrasi tersebut,” ujarnya kepada Parlemen baru-baru ini.

Menurut Michael, saat ini pihak otoritas bandara telah membentuk tim audit untuk menemukan persoalan utama robohnya hanggar kalibrasi tersebut. “Saat ini mereka telah membentuk tim audit semoga tim audit dapat bekerja dan nantinya juga akan kita undang di DPR saat Rapat Dengar Pendapat untuk memberikan penjelasan soal robohnya hanggar itu,” jelasnya.

Dirinya mengharapkan, kualitas ilmiah yang dimiliki oleh para ahli independen itu dapat memberikan penjelasan dan gambaran diluar Kementerian Perhubungan. “Intinya kami tidak ingin berspekulasi berlebihan tetapi hendaknya menunggu langkah yang telah dilakukan Kementerian dan tim audit investigasi dari ITB,” katanya.

Dia menambahkan, Komisi V DPR juga telah melakukan kunjungan



Wakil Ketua Komisi V DPR Michael Watimena saat diwawancara wartawan

spesifik meninjau Hanggar tersebut untuk mendapatkan gambaran soal robohnya hanggar itu. “Kita telah melakukan kunjungan spesifik yang bertujuan melihat secara langsung bagaimana kondisi rubuhnya hanggar kalibrasi dan sekaligus ingin mendapatkan masukan dari teman otoritas bandara, sebagai owner daripada Hanggar kalibrasi ini. juga pelaksana daripada program hanggar yang dimaksud itu,” paparnya.

Michael mengatakan, pemangku kepentingan harus bekerja secara optimal supaya hasilnya dapat diterima dalam waktu satu bulan. “Harus lebih cepat supaya masyarakat bisa tahu apa yang menjadi penyebab runtuhnya hanggar kalibrasi yang dimaksud. jangan sampai terulang lagi peristiwa terdapat. kita ingin agar konstruksi itu betul menjadi garda terdepan,” katanya. (Sugeng), foto : sugeng irianto/parle/hr.

Tamu Asing Dengan Agenda Khusus Patut Diwaspadai

Komisi III DPR RI meminta Kantor Imigrasi di Papua mencermati kehadiran tamu asing yang datang dengan agenda khusus. Menyambut tamu dengan baik adalah sifat bangsa Indonesia tetapi hendaknya tidak menghilangkan kewaspadaan.

“Data yang kita terima ada 2.251 orang asing di Papua ini. Bagaimana pengawasan terhadap kegiatan mereka karena kasus yang saya terima mereka kita sambut baik tapi pulang dengan membawa isu negatif misalnya mengusung Papua Merdeka,” kata anggota Komisi III Wenny Warraow saat

pertemuan dengan jajaran Kanwil Kemenkumham Papua, di Jayapura, Rabu (19/3/15).

Pertemuan ini merupakan bagian dari kunjungan kerja Komisi yang membidangi masalah hukum ini ke provinsi yang terkenal dengan keelokan burung Cendrawasihnya. Sementara itu Ketua Tim Kunker Benny K. Harman mengingatkan NKRI adalah wilayah terbuka sehingga tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Ia meminta pengawasan warga asing harus dilakukan dalam kerangka pencegahan.

“Bagi saya kalau langkah preventif berjalan dengan baik



Tim Kunker Komisi III DPR foto bersama dengan empat lingkungan Peradilan Mahkamah Agung di Papua

maka tentu tentu tindakan represif tidak diperlukan lagi. Prinsipnya Papua ini seperti rumah kaca, tidak ada yang kita tutup-tutupi,” tutur Benny yang juga Wakil Ketua Komisi III ini. Dalam penjelasannya Kepala Kan-

wil Kemenkumham Papua Demianus Rumbiak menjelaskan, sebagian besar warga asing di Papua adalah para misionaris dan pekerja asing yang bekerja di Freeport. Menurutnya sejumlah langkah preventif dan represif telah dilakukan diantaranya terhadap dua wartawan asal Perancis yang melakukan tindakan spionase di Wamena.

Dalam pertemuan tersebut dibahas pula sejumlah isu tentang kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Papua terutama uang lauk pauk yang bagi warga binaan yang perlu ditinjau ulang. “Harga makanan di Papua ini lebih mahal, jadi tidak bisa anggarannya disamakan dengan wilayah lain di Indonesia. Kami harap Komisi III membantu kami merevisi anggaran ini,” demikian Demianus. (iky) foto: ibnur khalid/parle/hr

DPR Soroti Kinerja Bawaslu Provinsi NAD

Komisi II DPR menyoroti Kinerja Bawaslu Propinsi Aceh dalam menyelesaikan persoalan sengketa Pilkada yang berlarut-larut. Hal itu mengemuka saat Komisi II DPR mengadakan pertemuan dengan jajaran Bawaslu Propinsi Aceh, di Banda Aceh, Selasa, (17/3).

“Kita telah telah melakukan pertemuan dengan Bawaslu Propinsi Aceh, pertemuan itu intinya membahas dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan dan permasalahan yang dihadapi oleh penyelenggara pemilu di Aceh, termasuk permasalahan yang dihadapi oleh Bawaslu,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria di Gedung Bawaslu Propinsi Aceh, Selasa, (17/3).

Dia menambahkan, Komisi II DPR akan membawa persoalan di Aceh ke tingkat Pusat saat RDP dengan KPU dan Bawaslu Pusat agar segera dibuatkan regulasinya terkait sengketa Pilkada agar tidak berlarut-larut.

Dia menyebutkan, penyelesaian sengketa Pilkada waktunya dibatasi sehingga banyak pelanggaran Pilkada yang dilakukan oleh pasangan calon bersama tim suksesnya, tidak bisa secepatnya dieksekusi dan diberikan hukuman.

“Hal itu dikarenakan Bawaslu dan Panwaslu Kabupaten/kota tidak punya tim penyidik sendiri seperti KPK. Selain itu, hari kerja anggota Bawaslu berdasarkan hari kalender Senin-Minggu sementara hari kerja anggota penyidik dari Polisi dan Jaksa, berdasarkan hari kerja normal yaitu dari Senin sampai jum’at. Maka banyak pelanggaran aturan Pilkada yang tidak bisa dibawa sampai ke pengadilan negeri selain karena waktu penyidikannya sangat terbatas, selain itu, anggota Bawaslu tidak punya penyidik sendiri,” terangnya.

Untuk masalah seperti ini, lanjutnya, Komisi II DPR akan merumuskan kembali formula atau kebijakan apa yang harus dilakukan agar apa yang menjadi kendala dan hambatan bagi anggota Bawaslu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya



Tim Kunker Komisi II DPR meninjau Kantor Bawaslu NAD

mengawasi tahapan Pilkada maupun Pemilu agar sesuai dengan azasnya yaitu demokrasi, jujur, aman dan damai serta tidak melanggar hukum, bebas, rahasia, dan tanpa kekerasan dan tekanan.

Sementara itu, anggota Bawaslu Aceh Asqalami mengatakan, kendala pengawasan Pilkada dan Pemilu tidak hanya terbatasnya waktu masa penyidikan dan ketiadaan penyidik sendiri, tetapi di beberapa Kabupaten/Kota juga sering terlambat membentuk Bawaslu.

“Hal ini terjadi karena tidak adanya sanksi terhadap Kepala Daerah yang tidak serius memfasilitasi pembentukan Bawaslu di daerah mereka. Padahal Kepala Daerah selaku pembina publik merupakan pihak yang bertanggungjawab atas kesuksesan pesta demokrasi, makanya Bupati dan Walikota tidak takut alias cuek dan masa bodoh terhadap masalah itu,” ungkapnya. (Spy) foto: supriyanto/parle/hr

Komisi III Dengarkan Mitra Kerja di Papua



Tim Kunker Komisi III DPR bersama Kapolda Papua dan Kapolda Papua Barat

Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi Papua. Komisi yang membidangi masalah keamanan, hukum dan HAM ini ingin memantau langsung kinerja mitra kerja di daerah.

“Kita ingin mendengar langsung

apakah ada hambatan dalam pelaksanaan UU, anggaran dan problem yang muncul dalam pelaksanaan tugas,” kata Ketua Tim Kunker Benny K. Harman dalam pertemuan dengan Kapolda Papua dan Kapolda Papua Barat di Jaya-

pura, Papua, Rabu (18/3/15).

Pada kesempatan itu Benny yang juga Wakil Ketua Komisi III menyampaikan maaf karena tidak bisa berkunjung langsung ke Papua Barat. Ia memberikan apresiasi kepada Kapolda Papua yang berkenan datang dan mengikuti pertemuan di Kantor Polda Papua.

Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Papua, Tim Kunker dijadwalkan akan mengadakan pertemuan dengan mitra kerja lain diantaranya Kakanwil Kementerian HAM, Badan Narkotika Nasional Papua, Kajati Papua, Ketua Pengadilan Negeri dan Tinggi di provinsi yang terkenal dengan burung Cendrawasih ini.

Agenda lain yang tidak kalah penting adalah peninjauan ke Lembaga Pemasarakan Kelas II Papua. Sejumlah anggota Komisi III mengikuti kunker ini diantaranya John Kenedy Aziz (FPG), Martin Hutabarat (FP Gerindra), I Putu Sudiarta (FP Demokrat), Muslim Ayun (FPAN) dan TB. Soemanjaya (FPKS). (iky)

foto: [ibnur khalid/parle/hr](#)

Sengketa Perbatasan Masih Marak di NAD

Komisi II DPR menemukan bahwa masih ada permasalahan sengketa terkait perbatasan di Provinsi NAD yang belum dapat terselesaikan, baik sengketa batas wilayah antar Aceh dengan Provinsi tetangga, maupun sengketa antar Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Aceh.

Hal itu mengemuka saat Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria mengadakan pertemuan dengan Gubernur Aceh Zaini Abdullah di Kantor Gubernur Aceh Selasa (17/3).

Ahmad Riza Patria menambahkan, hambatan dan kesulitan yang dialami oleh Pemerintah Provinsi Aceh dalam upaya penyelesaian masalah sengketa batas wilayah, terutama terkait dengan pengimplementasian Permendagri no. 76 tahun 2012 tentang pedoman Penegasan Batas Daerah (yang merupakan Perubahan atas Permendagri no. 1 tahun 2006 tentang pedoman Penegasan Batas Daerah).

Selain itu, Politisi Partai Fraksi Gerindra tersebut mempertanyakan, tentang koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Aceh dengan Badan Pengelola Perbatasan dalam perencanaan pengembangan/pembangunan wilayah terluar, selain itu sejauh mana peran Pemerintah Provinsi Aceh dalam menentukan Kecamatan ataupun Desa yang menjadi lokasi prioritas dalam program pengembangan wilayah perbatasan yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Pengembangan Perbatasan.

Dia juga menyinggung tentang reformasi birokrasi dan permasalahan serta penyelenggaraan pelayanan publik



Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria berdialog dengan Gubernur NAD

yang sedang dan telah ditempuh oleh pemerintah Provinsi Aceh dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi dilingkungan pemerintah Provinsi Aceh. Terutama jika dikaitkan dengan adanya Undang-Undang terhadap Aparatur Sipil Negara.

Gubernur Aceh Zaini Abdullah mengatakan hampir sepuluh tahun sudah proses recovery Aceh pasca tsunami dan proses perdamaian Aceh berlangsung. Namun berbagai permasalahan masih banyak kita hadapi di daerah terutama masalah perbatasan, pelayanan publik, kemiskinan, lapangan pekerjaan dan masalah kesejahteraan rakyat lainnya.

Zaini Abdullah juga menegaskan, sebagian dari masalah yang dihadapi Aceh itu merupakan bidang yang ditangani Komisi II DPR, khususnya menyangkut reformasi birokrasi dan tata kelola Pemerintahan, Otonomi Daerah, serta

Agraria atau Pertanian.

Di sisi lain, lanjutnya, Pemerintah Daerah NAD, tidak bisa memungkiri bahwa dalam mengatasi masalah-masalah yang ada, membutuhkan dukungan kebijakan dan finansial dari Pemerintah Pusat, serta dukungan politik dari Parlemen. “Dua hal ini tidak bisa dipisahkan dalam menyelesaikan persoalan di Aceh,” tegas Zaini.

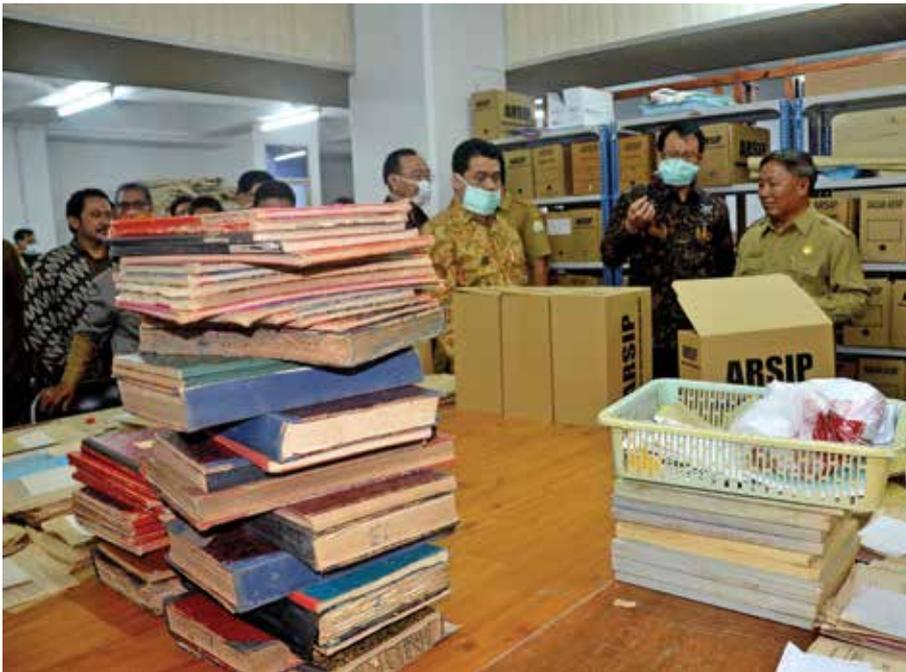
Atas dasar kebutuhan itu, lanjut Zaini Abdullah, pihaknya mengapresiasi Kunjungan Kerja Komisi II DPR ke Provinsi NAD, sehingga berbagai persoalan yang ada, bisa langsung disampaikan dalam pertemuan kali ini.

“Kami sangat senang jika Anggota DPR melalui Komisi II DPR melakukan Kunjungan Kerja ke Aceh. Dengan adanya Kunjungan Kerja itu, kami memiliki kesempatan untuk me-

nyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di Aceh. Begitu banyaknya tantangan dan hambatan yang kami hadapi, maka hakekat dari pertemuan yang dilaksanakan adalah untuk menunjukkan betapa besarnya keinginan kami agar Komisi II DPR dapat membantu memecahkan masalah yang dihadapi di daerah Aceh,” jelasnya.

Untuk itu, tambahnya, Pemerintah Provinsi Aceh siap untuk membangun komunikasi dan koordinasi dengan Komisi II DPR, dimana dan kapan saja. “Dengan komunikasi dan koordinasi ini, kami berharap berbagai masalah yang ada di Aceh bisa kita pecahkan bersama, sehingga upaya kita untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh dapat tercapai,” kata Zaini. *(Spy) foto: supriyanto/parle/hr*

SDM Arsiparis di NAD Masih Kurang



Tim Kunker Komisi II DPR meninjau Arsip dan Perpustakaan Provinsi Aceh

Kunjungan Kerja Komisi II DPR ke Provinsi Aceh kali ini adalah dalam rangka untuk menyerap aspirasi dan mengetahui perkembangan beberapa instansi yang ada di Provinsi Nangroe Aceh Darusalam.

Tim Kunker melakukan peninjauan, antara lain meninjau langsung ke Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh (Arpus) yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria, baru-baru ini. Tim melakukan pemantauan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional yang mendapat beberapa sertifikat terakhir salah satunya

sertifikat ISO dari Tuv Nord. Selain itu para Anggota DPR dari Komisi II DPR juga memantau arsip-arsip yang disimpan di Depo Badan Arpus Aceh.

Dari hasil kunjungan kerja dan pantauan Komisi II DPR, Ahmad Riza Patria meminta agar Badan Arpus Aceh dapat lebih aktif dalam mencari data mengenai kearsipan yang akan mengakuisisi data dan arsip penting lainnya. “Arsip di Aceh sudah sangat baik, sangat progresif mudah-mudahan kedepan bisa lebih baik lagi dan diikuti oleh arsip-arsip di Provinsi lain,” ujarnya.

Politisi Fraksi Partai Gerindra mende-

sak Badar Arsip dan Perpustakaan Aceh untuk lebih meningkatkan penyelamatan arsip apabila terjadinya bencana gempa dan tsunami seperti kejadian di tahun 2000 silam, sehingga dapat menjadi contoh bagi arsip di Provinsi lain dalam menyelamatkan arsip dari bencana alam.

Sementara itu Kepala Badan Arpus Aceh, Hasanuddin Darjo mengatakan Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh telah memberikan manfaat perannya kepada masyarakat, dimana saat tsunami melanda Aceh banyak masyarakat yang meminta pihaknya untuk menyelamatkan data-data dan arsip penting, terutama arsip pertanian.

“Kita sudah memberikan manfaat terhadap peran penting kita yang telah menyelamatkan dan menyimpan arsip-arsip terutama arsip pertanian pada tsunami lalu, Kedepan, kita akan terus meningkatkan pelayanan yang ada di Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh,” jelasnya.

Dia mengakui masih terdapat kekurangan di Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh diantaranya yaitu masih minimnya Sumber Daya Manusia yang mengelola arsip yakni dibidang arsiparis. “SDM yang kita miliki masih kurang, arsiparis yang kita miliki hanya 70 orang diseluruh daerah Aceh, sedangkan yang kita butuhkan sekitar 300 arsiparis, ditingkat Provinsi kita hanya memiliki 10 orang arsiparis tingkat ahli dan media,” kata Hasanuddin. *(Spy) foto: supriyanto/parle/hr*



BPA Diharapkan Jadi Solusi Konflik Tanah Di Aceh

Komisi II DPR mengharapkan dengan berpindahnya status Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi Badan Pertanahan Aceh (BPA) dapat menjadi solusi penanganan konflik tanah di provinsi Aceh ke depannya.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria yang sekaligus memimpin Tim Kunjungan Komisi II DPR ke Provinsi Nangroe Aceh Darusalam saat melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional Aceh Senin, (16/3) malam.

Riza menambahkan, meskipun Kantor BPN berubah menjadi BPA maka secara otomatis berada di bawah Pemerintah Provinsi Aceh namun tidak memutuskan hubungan kerja dengan Komisi II DPR. “Dengan BPA nantinya biarpun ganti nama dari BPN menjadi BPA tetapi tetap berinduk kepada Kementerian Dalam Negeri, sementara Kementerian Dalam Negeri masih menjadi mitra kerja Komisi II DPR,” jelasnya.

Terkait persoalan tanah di Aceh, Politisi Fraksi Partai Gerindra ini mengemukakan, saat ini Pemerintah Provinsi Aceh sedang bersengketa soal tanah dengan TNI-AD. “Sejauh pengalaman yang diketahui banyak sekali tanah di wilayah Indonesia yang masih bersengketa dengan pihak TNI, dan sampai sejauh ini masih belum dapat diselesaikan bersama,” katanya.

Dia mengharapkan, tidak ada persoalan seperti kasus pemerintah Provinsi Aceh dengan TNI kedepannya dengan adanya perubahan tata kelola pertanahan. “Mudah-mudahan ini secepatnya dapat diselesaikan sebelum berubah status dari BPN menjadi BPA, maka secepatnya diadakan pertemuan antara kedua belah pihak yang sedang bersengketa yaitu antara Pemerintah Provinsi Aceh dengan pihak TNI,” tandasnya.

Pada kesempatan itu, Riza juga menyinggung masalah aset-aset yang ada hubungannya dengan Pemerin-



Ketua Tim Kunjuran Komisi II DPR Ahmad Riza Patria

tahan Pusat dengan pihak swasta. “Ini Juga ada kaitannya dengan pihak perusahaan Internasional maka perlu pendekatan secara khusus karena jangan sampai ada keputusan yang tiba-tiba merugikan salah satu pihak, dan ini tidak boleh terjadi,” jelasnya.

(Spy) foto: supriyanto/parle/hr

Pemprov Sulut Kurang Serius Perhatikan UKM

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dinilai kurang serius memperhatikan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di daerah tersebut. Sehingga, perhatian kepada keduanya terkesan menjadi lambat. Padahal, tak lama lagi, Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Hal ini diungkapkan oleh Anggota Komisi VI Vanda Sarundajang, usai pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Komisi VI dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Bank, BUMN dan BUMD, Permodalan Nasional Madani dan Perusahaan Penjaminan (Askrindo dan Jamkrindo), di Aula Kantor Perwakilan BI di Manado, Selasa (17/03/15). Tim Kunker dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI Azam Azman Natawijana (FPD).

“Saya harus jujur mengatakan bahwa perhatian Pemerintah Provinsi Sulut kepada UKM dan UMKM terkesan kurang



Anggota Komisi VI DPR Vanda Sarundajang

serius. Padahal sektor UKM dan UMKM ini benar-benar menjadi prioritas agar mampu bersaing pada MEA. Oleh karena itu, saya sampaikan kepada Pemprov, maupun Perbankan dalam menyalurkan kreditnya, agar sektor ini digarap dengan serius,” tegas Vanda.

Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, UKM dan UMKM merupakan sektor yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cepat baik nasional maupun lokal. Sehingga, ia berharap Pemerintah Sulut diharapkan lebih mendorong agar UKM dan UMKM semakin menggeliat lewat pembinaan maupun pembiayaan dari perbankan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah.

Ia juga menyayangkan sikap Pemprov yang kurang gencar memperkenalkan produk UKM dan UMKM. Bahkan, yang dikenalkan Kain Bentean saja, padahal ada begitu banyak produk unggulan daerah lain yang lebih tinggi nilai tambahnya. Seperti Kepulauan Sitaro dengan komoditas palanya, Kabupaten Minahasa dengan eceng gondok yang banyak tumbuh di Danau Tondano, dan beberapa produk lainnya yang bisa dijadikan kerajinan yang memiliki nilai tambah.

“Potensi ini seharusnya bisa dilihat oleh pemerintah daerah, sehingga UKM dan UMKM bisa berkembang dengan baik dan siap menghadapi MEA. Wirausaha muda juga perlu dibina sampai mandiri, sehingga mampu membuka sektor UKM dan UMKM yang baru dan berkualitas,” jelas Politisi asal Dapil Sulut ini.

Putri dari Gubernur Sulut SH Sarundajang ini menambahkan, bantuan yang sudah diberikan oleh Pemerintah juga perlu mendapat pengawasan se-

cara ketat oleh dinas terkait yang ada di daerah. Sehingga, bantuan yang diberikan menjadi tidak mubazir, dan sektor industri kecil yang baru dapat tercipta.

Sebelumnya, Direktur Bisnis Mikro PT PNM (Persero) Carolina Dina Rusdiana mengatakan, PNM tak hanya memberikan bantuan modal saja, juga mengedepankan program Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) sebagai agen utama pelayanan UMKM di daerah.

“Target PNM akan memperluas ULaMM sampai 1200 unit yang ada di

4500 Kecamatan di Indonesia. Bahkan, target nasabah pun akan ditingkatkan hingga lebih dari satu juta nasabah, dengan menyerap 1,8 juta tenaga kerja,” jelas Caroline.

Apalagi, tambah Carolina, melalui penerimaan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1 triliun yang diterima oleh PNM, pihaknya akan tetap fokus pada pembiayaan dan pemberdayaan mikro selaras dengan perkembangan teknologi. (sf) foto: sofyan/parle/hr

Sulut Miliki Potensi Pariwisata Luar Biasa

Tak dipungkiri, Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke, banyak potensi wisata yang ditawarkan oleh negara yang memiliki lebih dari 17 ribu pulau ini. Potensi wisata luar biasa juga dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Utara.

Demikian diungkapkan oleh Anggota Komisi VI Mohammad Hekal, saat melakukan kunjungan kerja bersama Tim Komisi VI, di Manado, Sulawesi Utara, Selasa (17/03/15). Tim Kunker Komisi VI dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI Azman Natawijana (F-PD).

“Provinsi Sulawesi Utara memiliki potensi wisata yang sangat luar biasa. Saya lihat, Provinsi ini juga sudah memiliki upaya untuk mempromosikan potensi pariwisatanya dengan cukup baik, melalui berbagai acara. Misalnya dengan mengadakan konvensi internasional, atau Bunaken Sail,” kata Hekal.

Namun, tambah Politisi Gerindra ini, walaupun memiliki potensi luar biasa dan upaya promosi, ia menilai belum tergarap dengan baik. Masih ada beberapa kekurangan yang perlu dikembangkan, sehingga dapat memaksimalkan potensi yang ada.

“Salah satu permasalahan yang kami temukan dan dikeluhkan Gubernur Sulut SH Sarundajang adalah masalah penerbangan. Selain jumlah penerbangan yang belum terlalu banyak, harus saya akui, harga tiket pesawat menuju ke Manado ini cukup mahal,” imbuh Hekal.

Untuk itu, Politisi asal Dapil Jawa Tengah IX ini setuju dengan apa yang diusulkan Gubernur, untuk menambah jumlah penerbangan, baik dari atau ke Manado. Namun, bukan hanya penerbangan dari Jakarta atau asal daerah domestik lainnya, melainkan penerbangan internasional.

“Menambah jumlah penerbangan itu bukan selalu *flight* dari Jakarta saja, tapi juga penerbangan internasional. Karena yang kita harapkan juga kedatangan wisatawan mancanegara. Seperti kemarin misalnya, Manado kedatangan wisatawan mancanegara dari China yang mencapai 2000 wisatawan. Ini kan luar biasa banyaknya,”



Bunaken

imbuhnya.

Untuk itu, sebagai mitra kerja dari maskapai penerbangan BUMN, yaitu Garuda Indonesia dan Citilink, ia mengaku akan menyampaikan hal ini kepada kedua mitra tersebut. Apalagi, China juga menjanjikan kedatangan 1 juta wisatawannya untuk datang ke Indonesia Timur, sehingga bisa dianalisa, destinasi mana yang favorit para wisatawan tersebut.

“Nanti kita coba suplai dari sisi penerbangannya. Termasuk sisi pendukungnya. Sehingga saya sampaikan ke Gubernur, kalau bisa sistemnya terintegrasi, termasuk penataan kota. Ketika turis sudah sampai di airport, sudah ada *information center*, kemudian disediakan buku panduan yang berisi informasi pariwisata di Sulawesi Utara. Kita harus bisa ‘jual diri’ untuk mengenalkan pariwisata kita ke dunia,” tambahnya.

Hekal mengungkapkan, kuncinya dari suksesnya pengembangan pariwisata adalah transportasi.

Jika biaya transportasi sudah cukup terjangkau, maka hal lainnya pun dapat berkembang.

Masih dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VI Lili Asdjuredja mengatakan, pengembangan pariwisata sebaiknya bukan hanya dilakukan di Bali atau Jakarta saja, tetapi juga bisa dilakukan di daerah-daerah lain, tak terkecuali Sulawesi Utara.

“Pemerintah sebaiknya memberikan kesempatan kepada daerah-daerah selain Bali dan Jakarta untuk mengadakan event internasional. Sehingga, pimpinan negara ataupun utusan dari negara lain itu dapat

mempromosikan Indonesia di negaranya. Efeknya, potensi ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, termasuk memberikan pendapatan ke daerah dan negara,” jelas Politisi Golkar ini.

Khusus untuk Provinsi Sulut, Lili menyarankan untuk



Anggota Komisi VI DPR Mohammad Hekal

bersinergi dengan Pemerintah Pusat. Selain itu, Pemerintah Provinsi juga dapat menggandeng investor untuk melakukan investasi di daerah, seperti membangun hotel, dan lainnya.

“Di Sulut sudah ada *international convention center*, dan hotelnya pun sudah cukup banyak, sehingga wisatawan pun tidak akan kesulitan di Sulut. Perlu ditambah sinergi antara pemerintah daerah dan pusat,” imbuh Politisi asal Dapil Jawa Barat II ini.

Hal senada diungkapkan oleh Anggota Komisi VI Vanda Sarundajang. Politisi Senayan yang juga putri dari Gubernur Sulut ini mengaku, Pemerintah Provinsi Sulut sedang mengembangkan pariwisata secara maksimal.

“Jadi, untuk pariwisata Indonesia Timur



Anggota Komisi VI Lili Asjudiredja

dapat diarahkan ke Sulut. Ini sebagai rasa keadilan dan keseimbangan antara Indonesia Barat dan Timur. Sulut juga memiliki banyak potensi luar biasa, namun harus dikembangkan secara maksimal dan berkelanjutan,” jelas Vanda.

Politisi PDI Perjuangan ini menyatakan, dukungan dari Pemerintah Pusat sendiri dinilai sudah cukup baik. Pemprov juga agresif mengembangkan daerahnya secara kreatif dan inovatif.

“Kami berikan apresiasi kepada Pemprov Sulut yang gencar melakukan lobby-lobby, bukan saja di pusat, tapi juga internasional. Apalagi banyak yang bilang, Sulut itu cantik dan memiliki potensi pariwisata yang sangat luar biasa,” tutup Politisi asal Dapil Sulut ini. (sf) foto: sofyan/parle/hr

DPR Akan Panggil Konsultan Pengawasan dan Perencana Hanggar Kalibrasi Hasanudin

Komisi V DPR akan segera memanggil dan meminta pertanggungjawaban konsultan pengawasan dan perencana terkait robohnya hanggar Kalibrasi di Bandara Hasanudin, Makasar yang menelan 5 korban meninggal dunia dan 14 orang luka-luka.

“Kita memang belum melihat secara teknis, setelah kita lihat dilapangan kita akan mengundang dan meminta pertanggungjawaban konsultan pengawasan, perencana dan pengawasan terhadap robohnya hanggar kalibrasi di Hasanudin ini,” ujar Anggota Komisi V DPR Markus Nari dari Partai Golkar sesuai melakukan peninjauan terkait jatuhnya Bandara Hasanuddin Makasar, Sulsel, baru-baru ini.

Menurutnya, Komisi V DPR tidak ingin mencari tahu siapa yang salah terkait persoalan jatuhnya Hanggar Kalibrasi tersebut. “Kita ingin melihat apakah sudah sesuai dengan material yang masuk apakah sudah sesuai dengan speknya jadi jelas nantinya,” jelasnya.

Dia menambahkan, nanti akan kelihatan apakah ini akibat kelalaian kontraktor dan pengawasan. “Ini bisa juga ada kesalahan salah saat merakit. Jadi kita meminta konsultan pengawasan menjelaskan kepada kita terkait kecelakaan ini,” katanya.

Dia mengatakan, perlu dilakukan



Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR di depan Hanggar yang roboh

pengawasan apakah spek di pabrik dan barang yang diterima sudah sesuai. “Kita meminta penjelasan dan tanggung jawab supervisi pelaksanaan kontraktor tersebut,” jelasnya.

Sementara anggota Komisi V DPR Rendy Lamadjido dari Fraksi PDIP menyalir adanya kelemahan struktur terkait pembangunan hanggar kalibrasi tersebut. “Terlihat memang adanya kelemahan struktur bisa saja karena angin, maupun getaran bisa saja ada penguatan di satu titik sehingga jadi

beban yang mengakibatkan terjadi kerubuhan hanggar kalibrasi tersebut,” katanya.

Menurutnya, bisa saja terjadi kesalahan perencanaan dalam pekerjaan. “Ini saya lihat adanya beban puntir, selain itu ada struktur yang lemah yang membuat hanggar itu jatuh karena tidak dapat menahan beban dan bertumpu di satu titik. ini bukan salah perencanaan tetapi salah pekerjaan,” katanya. (Si) foto: sugeng irianto/parle/hr.



Jumpa Pers Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan KPK, Senin (16/03), Foto: Iwan Armanias, Denus/Parle/HR



Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI mendapat penjelasan mengenai rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dari Wakil Walikota Bitung (kiri), dan meninjau DOK Perkapalan PT Industri Kapal Indonesia di Bitung, Sulawesi Utara (kanan), Rabu (18/03/15). Foto: Sofyan/Parle/HR



Panja Revisi UU Perbankan Komisi XI DPR dipimpin Gus Irawan Pasaribu menggelar pertemuan dengan mitra kerja di Makassar Sulsel, Senin (16/03)Foto: Andri/Parle/HR

